



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MARGONO
2. Jabatan : POKJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
3. NHK : 156297

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 733.417.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 480 m2/192 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/70 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 104.985.000
3. Tanah Seluas 1107 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 363 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 168.432.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 231.400.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 162.000.000
2. MOTOR, HONDA ADV 150 SEKUTIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000
3. MOTOR, HONDA SKOPY SEKUTIC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.900.000
4. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 31.900.000

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 4.398.927

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 62.000.000

**Sub Total** Rp. 1.063.115.927

**III. HUTANG**

Rp. 112.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 951.115.927

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.